

ANALISIS PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA*ANALYSI OF CASH RECEIPT ACCOUNTING PROCEDURES AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

Jennyver S. Bilalang¹
Jessy D.L. Warongan²
Christian Datu³^{1, 2, 3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

jennyverbilalang@gmail.com[²jdimarcus@gmail.com](mailto:jdimarcus@gmail.com)[³itho.cd@gmail.com](mailto:itho.cd@gmail.com)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif, sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif yang dimulai dengan pengumpulan data sampai pada ditarik kesimpulan. Penerimaan kas merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintahan untuk membangun program pembangunan pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan prosedur penerimaan kas sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Analisis, Prosedur, Penerimaan Kas.

Abstract: This study aims to analyze the suitability of the cash receipt procedure at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province with the Ministry of Internal Affairs Regulation Number 21 of 2011 and the Government Internal Control System. This type of research is qualitative research, while the method of analysis used is descriptive method, which begins with data collection until conclusions are drawn. Cash receipts are a very important source of income for the government to build government development programs. The results of this study indicate that in general the North Sulaesi Province Regional Revenue Agency has implemented cash receipt procedures in accordance with PERMENDAGRI Number 21 of 2011 and the Government Internal Control System has been running well.

Keywords: Analysis, Procedures, Cash Receipts.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 atas Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang ber sumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

Pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 21 Tahun 2011 atas Perubahan Kedua Permedagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Penerimaan kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh dua aktivitas, yaitu: penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Pendapatan daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari tiga yakni: pertama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kedua Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketiga lain-lain pendapatan yang sah yaitu pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Dalam melakukan penerimaan kas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus memiliki prosedur sesuai dengan peraturan yang di atur oleh pemerintah. Prosedur pada umumnya di tunjukkan untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk perencanaan dan pengendalian di dalam mengatasi kegiatan penyelewengan dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, dalam prosedur penerimaan kas khususnya penerimaan pajak mensyaratkan adanya pemisahan dan fungsi-fungsi secara jelas, maka diharapkan dapat dilaksanakan secara akuntabilitas, transparan dengan setiap anggaran yang ada. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang prosedur penerimaan kas khususnya penerimaan pajak, berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Untuk itu penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis memadai tidaknya prosedur akuntansi penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditunjukkan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum. Jadi akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengembalian keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Standar Akuntansi Sektor Publik

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Pelaksanaan standar akuntansi sektor publik merupakan masalah yang serius bagi praktik akuntansi, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi suatu pihak, namun dapat juga merugikan bagi pihak lain (Mardiasmo 2018: 186).

Prosedur Akuntansi Penerimaan kas

Menurut PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011 Pasal 241 Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan pada prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD, terdiri atas :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
2. Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
3. Surat Tanda Setoran (STS)
4. Bukti Transfer
5. Nota Kredit Bank
6. Buku Jurnal Penerimaan Kas
7. Buku Besar
8. Buku Besar Pembantu

Sistem Pengendalian Internal

Mulyadi (2016:129) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang digabungkan untuk melindungi aset organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian internal disebut juga sebuah kerangka kerja terintegrasi adalah sebuah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal (Warren, dkk, 2015:400).

Sistem Pengendalian Internal Menurut COSO

Pengendalian internal menurut *COSO*, suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris perusahaan, manajemen dan personel lainnya, diterapkan dalam penetapan strategi yang meliputi keseluruhan perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mungkin mempengaruhi organisasi dan mengelola perusahaan sesuai dengan *risk appetite* perusahaan untuk menyediakan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan perusahaan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Adapun unsur-unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu:

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian Risiko
- 3) Kegiatan Pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pemantauan Pengendalian Intern

Penelitian Terdahulu

Tamboto (2016) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon, bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas di Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penerimaan kas khususnya penerimaan pajak sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 yang mencakup fungsi, dokumen, dan catatan yang digunakan.

Fengky (2019) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada Hotel Yuta Manado, bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada Hotel Yuta Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengendalian intern penerimaan kas pada Hotel Yuta belum memadai dengan membandingkannya menurut teori SPI dari COSO. Dimana masih terdapat adanya kelemahan atau belum sesuai dengan aktivitas pengendalian, dari segi pemahan tentang teknologi, dimana dibagian kasir/receptionist belum menggunakan sistem komputer.

Sinthia (2016) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas (studi kasus kota manado dan kota tomohon), bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah sistem dan prosedur akuntansi penerimaan daerah di Kota Manado dan Kota Tomohon berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado dalam prosedur pencatatan pendapatan daerah menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD untuk membukukan retribusi yang diterimanya meskipun pelaksanaan PP 71 Tahun 2010 terhitung tahun 2015 tetapi Badan Pengelola Keuangan dan Badan Milik Daerah Kota Manado sudah mulai menyesuaikannya sebelum tahun tersebut.

Sunanto (2017) dalam penelitian yang berjudul Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Musi Banyuasin, bertujuan untuk mengetahui realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2013 sampai dengan 2015 berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil pembahasan menunjukkan kinerja APBD DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin atas penerimaan PAD sudah efisien, tapi ditinjau dari sudut efektivitas kinerja APBD tidak efektif, karena realisasi yang diperoleh tidak bisa melebihi anggaran yang ditentukan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kondisi atau hal lain mengenai sistem dan prosedur penerimaan kas yang hasilnya data dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Data kualitatif berupa bahan keterangan dalam bentuk uraian kata-kata dan tidak dapat diukur dalam skala numerik dengan cara melakukan pengamatan kepada objek penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Yang beralamatkan Jl. 17 Agustus No.67, Kota Manado. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2020.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif berupa seperti hasil wawancara dengan sekretaris BAPENDA, bendahara penerimaan, kepala bidang pajak dan bagian akuntansi, dokumen sejarah perusahaan, dokumen struktur organisasi, dokumen visi dan misi, dokumen Surat Tanda Setor (STS), dokumen tentang pelaksanaan prosedur penerimaan kas.

Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, sedangkan data sekunder adalah data diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (Salim dan Haidir:2019). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

- a. Teknik Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab dengan narasumber..
- b. Teknik Dokumentasi, yaitu peneliti mengambil gambar atau data-data sebagai bukti pendukung penelitian. Data-data seperti hasil wawancara dengan sekretaris BAPENDA, bagian keuangan, kepala bidang pajak dan bagian akuntansi, dokumen sejarah perusahaan, dokumen struktur organisasi, dokumen visi dan misi, dokumen Surat Tanda Setor (STS), dokumen tentang pelaksanaan prosedur penerimaan kas.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif berupa menguraikan, membandingkan dan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan prosedur penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Proses Analisis

Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data mengenai sistem dan prosedur penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara seperti hasil wawancara dengan sekretaris BAPENDA, bagian keuangan, kepala bidang pajak dan bagian akuntansi, dokumen sejarah perusahaan, dokumen struktur organisasi, dokumen visi dan misi, dokumen Surat Tanda Setor (STS), dokumen tentang pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas.
2. Menganalisis pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas dengan cara melihat data-data yang telah di ambil serta membandingkan antara prosedur yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PERMENDAGRI 21 Tahun 2011.
3. Kemudian dilakukan juga analisis berupa pegujian tentang prosedur tersebut atas unsur-unsur sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir pemantauan pengendalian intern.
4. Menganalisis sesuai atau tidak sesuai antara prosedur dengan unsur-unsur pengendalian internal dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tabel analisis.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan hasil analisis sesuai atau tidak sesuai prosedur penerimaan kas yang diterapkan oleh BAPENDA dengan unsur-unsur pengendalian internal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Objek Penelitian

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tanggal 23 September 1964 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Utara, terletak di utara Pulau Sulawesi dengan ibukota Manado. Secara administratif, Provinsi Sulawesi Utara memiliki 15 daerah

otonom definitif, yang terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota, 171kecamatan, dan 1.838 desa/kelurahan. Sulawesi Utara memiliki 286 pulau, 59 pulau berpenghuni, dan 227 pulau belum berpenghuni, serta memiliki 11 pulau terluar/terdepan, dan 2 pulau yang langsung berbatasan dengan Philipina, yaitu Pulau Miangas dan Pulau Marore.

Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk pada Tahun 1962 dengan nama Kantor Pajak, yang saat itu merupakan bagian dari pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kepala Badan yang ditugaskan oleh Gubernur dan Sebagai instansi yang mempunyai tugas pengkoordinasi pendapatan daerah sekaligus sebagai instansi pelayanan publik atau bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka tentunya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan.

Prosedur Penerimaan Kas

Prosedur penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 pasal 241, yaitu sebagai berikut:

- a. Bendahara Penerimaan berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas seperti STS yang diterima dari bidang pajak dan Rekening Koran yang diterima dari bank akan mencatat ke dalam jurnal penerimaan kas dan pencatatan yang digunakan yaitu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).
- b. Setelah mencatat jurnal penerimaan kas di SIMDA maka secara otomatis Buku besar dan laporan keuangan seperti LRA, LO, LPE, Neraca sudah tersedia.
- c. Kemudian bagian akuntansi akan membuat CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) berdasarkan data yang ada di dalam aplikasi SIMDA.
- d. Selanjutnya laporan keuangan akan diberikan kepada kepala sub. Bagian keuangan untuk diperiksa jika sudah benar kemudian diserahkan kepada Sekretaris Badan untuk di paraf kemudian lalu diberikan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani.
- e. Setelah ditandatangani oleh Kepala Badan laporan keuangan SKPD akan dirangkum menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pembahasan

Analisis Prosedur Penerimaan kas

Berdasarkan hasil penelitian prosedur akuntansi penerimaan kas sudah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pihak terkait yang terdapat dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sudah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 pasal 241. Dokumen yang digunakan oleh pihak terkait mulai dari SKP- Daerah, STS, Bukti Transfer, Rekening Koran sudah sesuai dengan peraturan. Selanjutnya laporan yang dihasilkan mulai dari LRA, LO, LPE, Neraca dan CALK sudah sesuai dengan peraturan.

Bendahara Penerimaan akan melakukan pencatatan yaitu jurnal penerimaan kas menggunakan aplikasi SIMDA dan selanjutnya secara otomatis didalamnya sudah terbentuk buku besar dan laporan keuangan seperti LRA, LO, LPE, Neraca. Kemudian bagian akuntansi akan membuat CALK berdasarkan data yang ada di dalam SIMDA. Tahap berikutnya laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh kepala sub. Bagian keuangan jika sudah benar maka akan di paraf oleh Sekretaris Badan kemudian ditandatangani oleh Kepala Badan. Selanjutnya laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dirangkum menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).

Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Berikut ini pada tabel 4.1 merupakan rangkuman hasil analisis pengendalian internal atas penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan kriteria efektif, kurang efektif dan tidak efektif. Efektif dimaksudkan yakni semua sub unsur pengendalian internal telah terpenuhi sesuai konsep pengendalian internal yang disyaratkan, kurang efektif yang dimaksud yakni semua sub unsure pengendalian

internal telah terpenuhi tetapi ada beberapa yang belum terpenuhi, dan tidak efektif yakni semua sub unsur pengendalian internal tidak terpenuhi.

Tabel 4. 1 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas

Unsur SPIP	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif
Lingkungan Pengendalian			
1. Penegakan integritas dan nilai etika			
2. Komitmen terhadap kompetensi			
3. Kepemimpinan yang kondusif			
4. Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan	√		
5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat			
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia			
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif			
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.			
Penilaian Risiko			
1. Identifikasi risiko		√	
2. Analisis risiko			
Kegiatan Pengendalian			
1. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan			
2. Pembinaan sumber daya manusia			
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi			
4. Pengendalian fisik atas aset			
5. Penetapan dan revisi atas indikator dan ukuran kinerja			
6. Pemisahan fungsi			
7. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting	√		
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian			
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya			
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya			
11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting			
Informasi dan Komunikasi			
1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi		√	
2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus			
Pemantauan Pengendalian Intern			
Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.	√		

Sumber: Data Olahan

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Prosedur penerimaan kas yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan dilakukan dengan baik mulai dari pihak-pihak terkait, dokumen yang digunakan dan laporan keuangan yang dihasilkan.
2. Prosedur penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan peraturan dan dilaksanakan dengan baik, mulai dari pendaftaran sampai pada penyeteroran.

3. Sistem Pengendalian Intern pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik dan memadai mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir pemantauan pengendalian intern. Akan tetapi masih ada yang harus diperbaiki yaitu dalam penilaian risiko terutama dalam kegiatan menginput rumus.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang ada, maka disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu kepada pemimpin Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar rutin membuat pelatihan teknis kepada para pegawai agar prosedur penerimaan kas semakin hari semakin dikembangkan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Terutama dalam melakukan pencatatan sampai dengan pembuatan laporan agar mengatasi masalah yang sering terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fengky, Hendrik. 2019. Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada Hotel Yuta Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 7, No.1, Hal. 1001-1010. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/23218>. Diakses pada 15 April 2020.
- Handayani, Monika. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Poliban Press. Yogyakarta.
- Hermawan, Iwan. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*. Penerbit Hidayatul Quran Kuningan.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2016 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan*.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2018 Tentang *Pajak Daerah*. Manado.
- Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara No. 81 Tahun 2016 Tentang *Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi*. Manado.
- Riyanto, dan Puji, Agus. 2015. *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Salim, dan Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Sinthia. 2016. Evaluasi sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas (studi kasus kota manado dan kota tomohon). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16, No. 4, Hal. 1175. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/14321>. Diakses pada 15 April 2020.
- Sujarwani, Wiratna V. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru. Yogyakarta.
- _____, _____. 2015. *Sistem Akuntansi*. Pustaka Buku Press. Yogyakarta.

Susanto. 2017. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal MONEX. Vol. 6, No. 1, Hal. 2089-5321. <http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/452>. Diakses pada 7 April 2020.

Tamboto, A. Jeasika. 2016. Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kota tomohon. Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Vol. 3, No.4, Hal. 2303-1174. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11157/10747>. Diakses pada 7 April 2020.

Tuanakotta, Theodorus. M. 2015. *Audit Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 Tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Warren, Carl S. Reeve, James. M dan Duchac, Jonathan E. 2015. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

